

lampiran II

E.2.A

ISBN : 978-602-17140-0-3

Prosiding SEMINAR INTERNASIONAL



**BUDAYA MEMBENTUK JATI DIRI
DAN KARAKTER BANGSA**

Padang, 13 November 2012

Forum ilmiah I

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

2012

Editor:

Khairil Anwar

Ronidin

M. Yunis



DI SUMATERA BARAT Zusneli Zubir	420
PENGARUH BATIK KRATON TERHADAP PERKEMBANGAN BATIK PASEBAN KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT Agus Nursalim	431
MENGGALI JATI DIRI MELALUI TEKS-TEKS ESTETIKA SENI TRADISI Julia	442
BUDAYA	
KLAIM BUDAYA ANTARA MALAYSIA DENGAN INDONESIA: SUMBER KETEGANGAN DAN BEBERAPA SOLUSI Rusdi Omar, Mohd. Azizuddin Mohd Sani & Abubakar Eby Hara	449
ADAT DAN KONFLIK BATAS NAGARI DI SUMATERA BARAT Susni Fitria Dewi, Hermayulis, Jamalluddin, dan Febri Julika	451
IKLAN DAN KONSTRUKSI IDENTITAS BUDAYA BANGSA Moh. Nur Arifin dan Ade Husnul Mawadah	460
MEMBENTUK KARAKTER BANGSA MELALUI KODIFIKASI EKOLEKSIKON BUDAYA RUMAH ADAT ETNIK SUMBA KODI Ni Putu Ayu Krisna Dewi	472
"BUDAYA MALU" MEMBANGUN KARAKTER BANGSA INDONESIA Dewi Kania Izmayanti	479
<i>TAU DINAN AMPEK</i> KARAKTER MASYARAKAT MINANGKABAU PENGONTROL KONFLIK Silvia Devi	486
THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL SPIRIT OF THE ETNIS TIONGHOA DAN MINANG: AFFECTIVE COMPETENCE DAN MOTIVATING EXPRESSIONS IN EDUCATIONAL PROCESS Lucy Suraiya dan Suhairi	494
PENDEKATAN KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA DALAM RESOLUSI KONFLIK ETNIS Nikmah Suryandari	506
	515

Kasus kerusuhan Situ-bondo (1997, Medan, Jakarta, Solo, Ketapang dan Kupang (1998), Bali (1999), Ambon, Maluku Utara (1999,2000,2003,2004), Mataram (2000), Kalimantan (2004), Jakarta (2005), dan Poso (2003-2006) merupakan beberapa contoh aktual masih lekat dalam ingatan kita. Hal ini sekaligus mengindikasikan betapa konflik dan kekerasan sosial akhir-akhir ini begitu mudah terjadi pada masyarakat kita. Padahal masyarakat kita dulu dikenal bersifat religius dan berbudaya santun: halus budi bahasanya, berbudi pekerti luhur, ramah-tamah perangnya, suka kerukunan dan perdamaian.

Menurut Arya Hadi Dharmawan (2006) konflik sosial yang berlangsung antar kelompok (*inter-group social conflict*) di ruang masyarakat sipil, dapat menyangkut krisis pluralitas-sosio-budaya dan benuansa identitas sosial. Konflik tersebut merupakan konflik yang paling sering terjadi di Indonesia seiring dengan krisis ekonomi dan jatuhnya rejim ORBA di tahun 1997. Dalam konflik benuansa etno-komunal, sangat tampak nyata adanya para pihak yang membawa atribut identitas ideologi, identitas antar-keagamaan, identitas kelompok atau juga perbedaan mazhab pada agama yang sama (konflik sektarian), serta perbedaan asal-usul atau keturunan sebagai pembeda utama kelompok yang saling menggugat, pelancaran klaim, atas persoalan yang disengketakan.

Masih menurut Arya Hadi Dharmawan (2006) meskipun akar-konflik yang bertanggung jawab atas terjadinya konflik sosial komunal di Indonesia sangatlah berbeda-beda, namun ada beberapa hal yang membuatnya sama yaitu adanya *radikalisasi perbedaan identitas*, *radikalisasi komunisme* serta dianutnya *bounded rationality* yang memicu "kesadaran kelas" (*class consciousness*) ala Marx dalam kelompok-kelompok yang bertikai. Hal-hal tersebut tidak bisa dielakkan ikut bertanggung jawab dan memperkuat dorongan kepada setiap warga untuk saling bersengketa dengan warga dari kelompok lainnya dan jika mungkin saling meniadakan (*eliminating strategy*). Pemahaman konflik sosial seperti ini dianut oleh para ahli sosiologi yang mendasarkan analisisnya pada perbedaan basis sosio-kultural (perspektif kulturalisme) yang dianut masyarakat.

Dari perspektif lain, tiap disiplin ilmu diharapkan memiliki sumbangan dan kontribusi dalam upaya mencegah terjadinya konflik horisontal di tengah masyarakat, ataupun melakukan upaya resolusi bila konflik sudah terjadi. Dalam hal ini, sebagai salah satu cabang ilmu sosial, ilmu komunikasi memiliki kajian yang dapat memberikan kontribusi tersebut.

Tulisan ini berusaha menelaah secara singkat kajian komunikasi lintas budaya sebagai upaya resolusi konflik sosial dan etnis di Indonesia. Kajian akan dimulai dengan pembahasan mengenai konflik sosial dan konflik etnis yang pernah terjadi di Indonesia beserta faktor-faktor penyebab, serta resolusi yang pernah dilakukan. Selanjutnya tulisan ini akan mendeskripsikan tentang konsep komunikasi lintas budaya, dan terakhir akan dikaji tentang komunikasi lintas budaya sebagai pendekatan sebagai upaya resolusi konflik etnis di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dalam tulisan ini dapat dirumuskan masalah :
Bagaimanakah pendekatan komunikasi lintas budaya dalam resolusi konflik etnis?

PENDEKATAN KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA DALAM RESOLUSI KONFLIK ETNIS

Nikmah Suryandari
Prodi Ilmu Komunikasi FISIB UTM Bangkalan Madura
skundari1504@yahoo.com

Abstrak

Salah satu fakta tak terbantahkan tentang kehidupan bermasyarakat adalah bahwa tidak ada satu negarapun di dunia ini yang memiliki identitas tunggal. Hal ini karena setiap negara pasti terdiri atas beberapa etnis, suku bangsa, dan identitas lainnya. Konsekuensi logis dari kondisi ini adalah bahwa kondisi keragaman ini merupakan potensi positif suatu negara, sekaligus ancaman munculnya konflik antar kelompok yang berbeda. Dengan fakta ini, setiap negara harus memiliki kesadaran tentang konsep multikulturalisme dan kesadaran lintas budaya. Kesadaran lintas budaya ini menjadi salah satu tujuan dalam pembelajaran komunikasi lintas budaya guna mendukung terciptanya masyarakat multikultural. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Salah satu faktor penting dalam menciptakan suasana yang mencerminkan multikulturalisme adalah kesadaran akan komunikasi lintas budaya dalam tataran konseptual dan praksis. Komunikasi lintas budaya merupakan bidang kajian komunikasi yang menekankan pada perbandingan pola-pola komunikasi antar pribadi di antara peserta komunikasi yang berbeda kebudayaan. Kebutuhan untuk mempelajari Komunikasi Lintas Budaya ini semakin terasakan karena semakin terbukanya pergaulan kita dengan orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda, disamping kondisi bangsa Indonesia yang sangat majemuk dengan berbagai ras, suku bangsa, agama, latar belakang daerah (desa/kota), latar belakang pendidikan, dan sebagainya.

Keywords : komunikasi lintas budaya, resolusi konflik, multikulturalisme

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kondisi plural bangsa Indonesia itu ternyata sangat rentan terhadap tindak kekerasan akibat konflik sosial terutama antar-etnik dan antar-agama, di samping antarkelas dan antar-golongan, yang lazim disebut dengan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Menurut Ali Imron (2006) kebhinnekaan (baca: pluralitas dan heterogenitas) bangsa Indonesia itu tentu saja merupakan nilai positif tetapi sebenarnya sekaligus menyimpan nilai negatif yang terkadang tak terhindarkan. Dengan pluralitas komponen bangsa Indonesia itu, di satu sisi kita dapat menghimpun dan mengembangkan berbagai potensi bangsa yang ada. Pluralitas budaya yang ada di tanah air misalnya, merupakan kekayaan yang tiada tara dan harus disyukuri. Namun, di sisi lain pluralitas tradisi dan agama, mudah sekali menimbulkan gesekan antarberbagai kelompok komunal, yang pada gilirannya akan dapat memunculkan kekerasan sosial.

Banyaknya kasus kerusuhan dan konflik sosial di Indonesia, khususnya sejak era reformasi menimbulkan tanda tanya besar di berbagai kalangan. Hal ini tentunya dapat dipahami karena selama ini kita sudah sangat akrab dengan karakter bangsa Indonesia yang digambarkan sebagai masyarakat yang ramah, system kekerabatannya penuh kegotong royongan, dan toleran. Namun sejak era reformasi bergulir, masyarakat justru sering menunjukkan karakter beringas dan mudah tersulut untuk berkonflik.

Kasus kerusuhan Situ-bondo (1997, Medan, Jakarta, Solo, Ketapang dan Kupang (1998), Bali (1999), Ambon, Maluku Utara (1999,2000,2003,2004), Mataram (2000), Kalimantan (2004), Jakarta (2005), dan Poso (2003-2006) merupakan beberapa contoh aktual masih lekat dalam ingatan kita. Hal ini sekaligus mengindikasikan betapa konflik dan kekerasan sosial akhir-akhir ini begitu mudah terjadi pada masyarakat kita. Padahal masyarakat kita dulu dikenal bersifat religius dan berbudaya santun: halus budi bahasanya, berbudi pekerti luhur, ramah-tamah perangnya, suka kerukunan dan perdamaian.

Menurut Arya Hadi Dharmawan (2006) konflik sosial yang berlangsung antar kelompok (*inter-group social conflict*) di ruang masyarakat sipil, dapat menyangkut krisis pluralitas-sosio-budaya dan benuansa identitas sosial. Konflik tersebut merupakan konflik yang paling sering terjadi di Indonesia seiring dengan krisis ekonomi dan jatuhnya rejim ORBA di tahun 1997. Dalam konflik benuansa etno-komunal, sangat tampak nyata adanya para pihak yang membawa atribut identitas ideologi, identitas antar-keagamaan, identitas kelompok atau juga perbedaan mazhab pada agama yang sama (konflik sektarian), serta perbedaan asal-usul atau keturunan sebagai pembeda utama kelompok yang saling menggugat, pelancaran klaim, atas persoalan yang disengketakan.

Masih menurut Arya Hadi Dharmawan (2006) meskipun akar-konflik yang bertanggung jawab atas terjadinya konflik sosial komunal di Indonesia sangatlah berbeda-beda, namun ada beberapa hal yang membuatnya sama yaitu adanya *radikalisasi perbedaan identitas*, *radikalisasi komunisme* serta dianutnya *bounded rationality* yang memicu "kesadaran kelas" (*class consciousness*) ala Marx dalam kelompok-kelompok yang bertikai. Hal-hal tersebut tidak bisa dielakkan ikut bertanggung jawab dan memperkuat dorongan kepada setiap warga untuk saling bersengketa dengan warga dari kelompok lainnya dan jika mungkin saling meniadakan (*eliminating strategy*). Pemahaman konflik sosial seperti ini dianut oleh para ahli sosiologi yang mendasarkan analisisnya pada perbedaan basis sosio-kultural (perspektif kulturalisme) yang dianut masyarakat.

Dari perspektif lain, tiap disiplin ilmu diharapkan memiliki sumbangan dan kontribusi dalam upaya mencegah terjadinya konflik horisontal di tengah masyarakat, ataupun melakukan upaya resolusi bila konflik sudah terjadi. Dalam hal ini, sebagai salah satu cabang ilmu sosial, ilmu komunikasi memiliki kajian yang dapat memberikan kontribusi tersebut.

Tulisan ini berusaha menelaah secara singkat kajian komunikasi lintas budaya sebagai upaya resolusi konflik sosial dan etnis di Indonesia. Kajian akan dimulai dengan pembahasan mengenai konflik sosial dan konflik etnis yang pernah terjadi di Indonesia beserta faktor-faktor penyebab, serta resolusi yang pernah dilakukan. Selanjutnya tulisan ini akan mendeskripsikan tentang konsep komunikasi lintas budaya, dan terakhir akan dikaji tentang komunikasi lintas budaya sebagai pendekatan sebagai upaya resolusi konflik etnis di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dalam tulisan ini dapat dirumuskan masalah :
Bagaimanakah pendekatan komunikasi lintas budaya dalam resolusi konflik etnis?

Manfaat

Manfaat dari tulisan ini adalah :

1. Menambah kajian komunikasi, khususnya komunikasi lintas budaya dalam upaya sebagai resolusi konflik antar etnis
2. Menciptakan kesadaran lintas budaya sebagai salah satu upaya membentuk masyarakat multikultur di Indonesia

PEMBAHASAN/ ISI

Terdapat hubungan yang sangat erat antara budaya dan komunikasi. Menurut Edward T. Hall (dalam Mulyana dan Rakhmat, 2000:vi) berpendapat bahwa: "*culture is communication*" dan "*communication is culture*". Artinya, budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya. Cara kita berkomunikasi sangat tergantung pada budaya kita : bahasa, aturan, dan norma kita masing-masing.

David Krech, et al., (1962) mengemukakan bahwa kebudayaan itu adalah hubungan manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Kebudayaan dapat ditafsirkan sebagai cermin tingkah laku manusia dalam menjawab masalah-masalah yang dihadapinya. Kebudayaan dapat dibagi menjadi *explicit culture* dan *implicit culture*. *Explicit culture* adalah pola tingkah laku yang khas mengenai suatu masyarakat yang secara langsung dapat diamati secara verbal dan nonverbal. *Implicit culture* adalah kebudayaan yang tak terlihat seperti yang terdapat pada : *culture beliefs, cultural norms, cultural values, cultural premises*, yang senada dengan faktor-faktor psikologis, seperti kognisi, kebutuhan atau keinginan, *interpersonal response traits* dan sikap. Faktor-faktor ini melandasi adanya perilaku yang dapat diamati (*explicit culture*).

Menurut Yohanes Bahari (2006) Dahrendorf berpendapat bahwa untuk menyelesaikan konflik perlu ada pemaksaan melalui kesepakatan (konsensus) terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui konsensus nilai-nilai dan norma-norma yang dipaksakan itulah masyarakat dapat dipersatukan dan dikendalikan sehingga tidak terjadi konflik yang mengarah kepada kehancuran. Model resolusi konflik Dahrendorf inilah yang kemudian diadopsi sehingga melahirkan model resolusi litigasi (hukum), non litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase) dan pranata adat.

Galtung menawarkan cara menyelesaikan konflik dengan membongkar fondasi dasar penyebab konflik. Itu berarti faktor budaya yang menjadi fondasi dasar setiap kekerasan harus ditransformasikan ke budaya perdamaian. Dalam pandangan Galtung menghentikan konflik kekerasan dan konflik struktural sangat tidak realistis jika tidak mengubah fondasi dasarnya, karena selama fondasinya masih kokoh (kekerasan kultural) maka kekerasan struktural dan konflik kekerasan itu tetap akan terjadi.

Komunikasi Lintas Budaya

1. Sebutan komunikasi lintas budaya (*cross culture*) sering digunakan untuk menyebut makna komunikasi antar budaya (*interculture*), tanpa dibatasi konteks geografis, ras dan etnik. Karenanya, komunikasi lintas budaya didefinisikan sebagai analisis perbandingan yang memprioritaskan relativitas kegiatan kebudayaan. Komunikasi Lintas budaya umumnya lebih terfokus pada hubungan antar bangsa tanpa harus membentuk kultur baru sebagaimana yang terjadi dalam Komunikasi Antar Budaya (Purwasito, 2003)

2. Menurut Fiber Luce (1991) hakikat studi lintas budaya adalah studi komparatif yang bertujuan membandingkan : (1) variable budaya tertentu, (2) konsekuensi atau akibat dari pengaruh kebudayaan, dari dua konteks kebudayaan atau lebih.

Harapannya dengan studi ini, setiap orang akan memahami kebudayaannya sendiri dan mengakui bahwa ada isu kebudayaan yang dominan yang dimiliki orang lain dalam relasi antarbudaya. Artinya Komunikasi Antar Budaya dapat dilakukan kalau kita mengetahui kebudayaan kita dan kebudayaan orang lain.

3. Komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi untuk membandingkan dua kebudayaan atau lebih melalui sebuah survey lintas budaya.

(<http://www.dictionarv.com> www.dictionarv.com <http://www.dictionarv.com>)

4. Komunikasi lintas budaya menurut Williams (1966) dalam Samovar dan Porter (1976) berkisar pada perbandingan perilaku komunikasi antar budaya dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan :

- persepsi dari pengalaman, peran lingkungan sosial dan fisik,
- kognisi terdiri unsure-unsur khusus kebudayaan, proses bahasa dan cara berpikir
- sosialisasi
- kepribadian seperti tipe-tipe budaya pribadi yang mempengaruhi etos, tipologi karakter atau watak bangsa.

Analisis lintas budaya (sering disebut analisis komparatif) sebagai metode umum yang sering digunakan untuk melakukan komparasi dan menguji perbedaan antar Budaya (Alo Liliweri, 2005). Metode ini bersifat krusial untuk membedakan aspek-aspek universal dari kebudayaan manusia dan organisasi sosial dari sebagian kelompok sosial atau individu dari masyarakat tertentu.

Dalam komunikasi lintas budaya, apabila terjadi perbedaan nilai-nilai budaya, social budaya dan psikobudaya, maka mudah menimbulkan prasangka terhadap etnik lain. Menurut Soelaiman (1992) ada beberapa kondisi yang tidak menguntungkan yang cenderung memperkuat prasangka. Diantaranya (1) bila situasi kontak menciptakan persaingan di antara berbagai golongan; (2) bila kontak yang terjadi tidak menyenangkan, dipaksakan, dan tegang; (3) bila situasi kontak menghasilkan rasa harga diri atau status dari salah satu golongan direndahkan; 4) bila warga dari suatu golongan atau golongan sebagai keseluruhan sedang mengalami frustrasi (misalnya baru saja mengalami kegagalan atau musibah, depresi ekonomi, dan sebagainya), kontak dengan golongan lain bisa membentuk pengambinghitan etnis; (5) bila kontak terjadi antara berbagai golongan etnis yang mempunyai moral atau norma-norma yang bertentangan satu sama lain; (6) bila dalam kontak antara golongan mayoritas dan golongan minoritas, para warga dari golongan minoritas statusnya lebih rendah atau berbagai karakteristiknya lebih rendah dari golongan mayoritas. Adanya beberapa sumber prasangka tersebut dapat menimbulkan konflik.

Resolusi Konflik Etnis

Menurut Ali Imran (2006) jika kita cermati, maka berbagai konflik yang terjadi di Indonesia terutama konflik antar-etnis dan antaragama lebih disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya kompleks. Meminjam teori etno-nasionalis mungkin bermula dari konfigurasi *intersected* kemudian berubah menjadi *consolidated* yang membuka kesadaran konflik dan kemudian memungkinkan terjadinya kekerasan kolektif. Hal itu

diperparah oleh adanya kenyataan pahit yang membuat masyarakat Indonesia tertekan selama lebih dari tiga dekade di bawah pemerintahan otoriter Orde Baru (1966-1998) yang represif. Resolusi konflik yang dilakukan dengan pendekatan kekerasan atau represif dianggap kurang tepat, apalagi di era pasca reformasi. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap penyelesaian melalui kekerasan militer tidak mampu menyelesaikan masalah dan tentu saja merupakan kebijakan yang kurang populer.

Menurut Arya Hadi Dharmawan (2006) dalam kondisi yang serba kompleks seperti di Indonesia maka tidak mudah bagi siapapun dan dengan cara apapun untuk menemukan solusi konflik sosial secara jitu dan manjur untuk semua kasus. Oleh karena itu, penyelesaian konflik sepantasnyalah diletakkan kembali dalam bingkai lokalitas dan didekati secara lokalitas pula. Pendekatan sepantasnya dilakukan secara bertahap-tahap, dan yang terpenting adalah selalu melibatkan semua pihak terkait dalam konflik untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi konflik. Hanya dengan pendekatan ini, maka pemahaman akan akar-konflik serta penyelesaian konflik menjadi lengkap dan menyeluruh. Segala cara yang menafikan *proses-proses partisipatif* dan *bottom-up approach* adalah upaya yang akan menghadapi kesia-siaan, karena konflik sosial pada hakekatnya adalah wujud riil interaksi sosial dimana para-pihaklah yang tahu mengapa mereka berinteraksi sosial dalam "jalur konflikktual" dan bukan kerjasama yang sinergetik.

Komunikasi Lintas Budaya Sebagai Upaya Resolusi Konflik Etnis

Dalam rangka menciptakan masyarakat Indonesia yang berBhineka Tunggal Ika dalam situasi yang kondusif, dan tidak mudah terjadi konflik diperlukan sebuah konsep dan kesadaran akan komunikasi lintas budaya. Konsep dalam komunikasi lintas budaya mengajarkan tiap individu dalam tiap budaya untuk menghormati anggota budaya lain sebagai manusia. Komunikasi lintas budaya juga mengharuskan kita menghormati budaya lain apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Selain itu, kita juga harus menghormati anggota budaya lain untuk bertindak berbeda dari cara kita. Dengan konsep-konsep tersebut, tiap orang pelaku (komunikator) komunikasi lintas budaya yang kompeten akan mampu menjadi seorang yang dengan mudah menerima perbedaan dengan orang lain. Hal ini akan mempermudah terciptanya masyarakat yang berBhineka Tunggal Ika dan mencegah konflik antar etnis yang potensial di wilayah multikultur seperti Indonesia

Dengan perspektif yang sama, komunikasi lintas budaya melihat keragaman bukan saja diakui akan tetapi harus diberikan kebebasan karena dengan keragaman maka akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Keragaman identitas menjadi persoalan yang serius dalam perjalanan bangsa Indonesia. Negara hendaklah memberikan pelayanan yang sama terhadap semua warga negaranya tanpa kecuali. Demikian juga tradisi budaya yang ada dalam setiap kelompok sosial hendaklah dipahami sebagai nilai-nilai kehidupan dunia (*world life*). Negara memiliki jarak yang sama terhadap setiap warganya.

Dalam perspektif komunikasi lintas budaya, kita harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi hambatan komunikasi lintas budaya yang dapat berujung pada goyahnya konsep Bhineka Tunggal Ika. Hambatan komunikasi lintas budaya tersebut diantaranya:

1. Etnosentrisme adalah kepercayaan pada superioritas inheren kelompok atau budayanya sendiri, etnosentrisme mungkin disertai rasa jijik pada orang lain yang tidak sekelompok, etnosentrisme cenderung memandang rendah pada orang-orang lain yang tidak sekelompok, etnosentrisme memandang dan mengukur budaya-budaya asing dengan budayanya sendiri (Mulyana, 2000:70)
2. Stereotype adalah menggeneralisasikan orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi orang-orang berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. Dengan kata lain, penstereotipan adalah proses menempatkan orang-orang ke dalam kategori-kategori yang mapan, atau penilaian mengenai orang-orang atau objek-objek berdasarkan kategori-kategori yang sesuai, ketimbang berdasarkan karakteristik individual mereka.
3. Prasangka adalah sikap yang tidak adil terhadap seseorang atau suatu kelompok. Beberapa pakar cenderung menganggap bahwa stereotip itu identik dengan prasangka. Stereotip merupakan komponen kognitif (kepercayaan) dari prasangka, sedangkan prasangka juga berdimensi perilaku. Jadi, prasangka ini konsekuensi dari stereotip, dan lebih teramat dari stereotip.
4. Rasialisme adalah suatu penekanan pada ras atau menitikberatkan pertimbangan rasial. Istilah ini merujuk pada suatu kepercayaan adanya dan pentingnya kategori rasial. Dalam ideologi separatis rasial, istilah ini digunakan untuk menekankan perbedaan sosial dan budaya antar ras

SIMPULAN

Kebutuhan untuk mempelajari Komunikasi Lintas Budaya ini semakin terasakan karena semakin terbukanya pergaulan kita dengan orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda, disamping kondisi bangsa Indonesia yang sangat majemuk dengan berbagai ras, suku bangsa, agama, latar belakang daerah (desa/kota), latar belakang pendidikan, dan sebagainya.

Memahami komunikasi lintas budaya dalam tataran konsep dan praksis akan meningkatkan pemahaman mengenai Indonesia yang berbhineka Tunggal Ika

DAFTAR PUSTAKA

Bahari, Yohanes. 2006. Model Komunikasi Lintas Budaya Dalam Resolusi Konflik Berbasis Pranata adatMelayu dan Madura Di Kalimantan Barat. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 6 No 1 Januari April

Dharmawan, Arya Hadi. 2006. Makalah pada Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan Kalimantan, dengan tema: "Pembangunan Sabuk Perkebunan Wilayah Perbatasan Guna Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Pertahanan Nasional", Pontianak 10-11 Januari 2007

Imron,Ali,2006.ResolusiKonflikAntaretnik Dan Antaragama:Perspektif Multikultural, Jurnal Akademika, Vol 4 No.1, April 2006

Liliweri, Alo. 2001. *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar2005 . *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta .LKIS.

Mulyana, Deddy dan Jalaludin Rakhmat. 2000. *Komunikasi Antarbudaya Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.